



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 14 Januari 2025/Khusus - Akhir Menjabat)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : LEGISLATIF
LEMBAGA : DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SIBOLGA
UNIT KERJA : PIMPINAN TERTINGGI

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **AKHMAD SYUKRI NAZRY PENARIK**
2. Jabatan : **KETUA DPRD**
3. NHK : **527693**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp. 2.980.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 353 m²/340 m² di KAB / KOTA TAPANULI TENGAH, HASIL SENDIRI Rp. 600.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 77 m²/77 m² di KAB / KOTA TAPANULI TENGAH, HASIL SENDIRI Rp. 220.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 64 m²/192 m² di KAB / KOTA KOTA MEDAN , HASIL SENDIRI Rp. 500.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 180 m²/160 m² di KAB / KOTA TAPANULI TENGAH, HASIL SENDIRI Rp. 630.000.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 25 m²/14.1 m² di KAB / KOTA TAPANULI TENGAH, HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000
6. Tanah dan Bangunan Seluas 27.2 m²/11 m² di KAB / KOTA TAPANULI TENGAH, HASIL SENDIRI Rp. 180.000.000
7. Tanah dan Bangunan Seluas 18.5 m²/12 m² di KAB / KOTA TAPANULI TENGAH, HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000
8. Tanah dan Bangunan Seluas 22 m²/12.5 m² di KAB / KOTA DELI SERDANG, HASIL SENDIRI Rp. 500.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp. 668.000.000**

1. MOTOR, HONDA K1H02N14LO A/T Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 8.000.000



2. MOTOR, YAMAHA 2 DP NON ABS Tahun 2017, HASIL SENDIRI
Rp. 10.000.000
3. LAINNYA, HITACHI EXCAVATOR Tahun 2000, HASIL SENDIRI
Rp. 250.000.000
4. MOBIL, TOYOTA FORTUNER 2.8 VRZ 4X2 A/T Tahun 2022,
HASIL SENDIRI Rp. 400.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	75.000.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	994.394.239
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	4.717.394.239
III. HUTANG	Rp.	----
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	4.717.394.239

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.